**Penerapan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) Terhadap
Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.**

Oleh : Jeremy Joy N

**Program Kekhususan : Hukum Perdata BW
Alamat : Jln Fajar Blok A, No. 4 , Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Email : enzionapit@gmail.com -Telepon : 0811763109**

ABSTRACT

*The judge's decision aims to resolve a dispute, the litigants have the option to submit an application for an immediate decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) and efforts to make it happen are regulated in Article 180 paragraph (1) HIR/Article 191 paragraph (1) Rbg, even though the Pekanbaru District Court Class I A often accepts requests for judgments immediately (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), but very rarely grants them. Immediate application of decisions (*uit voerbaar bij voorraad*) in civil cases in Register Number: 26/Pdt.G/2012/PN.PBR and civil cases register number: 116/Pdt.G/2013/PN.PBR at the Pekanbaru District Court Class IA.*

This type of research can be classified into the type of sociological research, with the research location taking place at the Pekanbaru District Court Class IA, while the population and sample are all parties related to the problem under study. This study uses data sources in the form of primary data and secondary data, and data collection techniques are carried out by interviews.

*From the results of the study, there are two main things that can be concluded, firstly the application of an immediate decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) at the Pekanbaru District Court has clearly been effective and relevant to be guided by developments in the world of justice, because before deciding an immediate decision, every condition has been fulfilled in accordance provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2000 Concerning Immediate Decisions (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) and Provisional and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2001 concerning Issues of Immediate Decisions (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) and Provisionil. Decisions can immediately become guidelines for judges to settle cases that cannot be executed because they do not include a commendator's order in their decision. Second, the obstacle to the granting of an immediate decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) according to the material requirements lies in the discrepancy between the case and the facts of the trial, because many cases that ask for an immediate decision (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tend not to meet the requirements set by SEMA, because most cases are in court Pekanbaru State, did not prepare the conditions needed to grant the decision immediately (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*). Formal obstacles when one of the seven requirements is met, the judge is instructed not to decide the case immediately, but first to consult the chairman of the high court and the chairman of the district court, although this procedure tends to limit the independence of judges, this is in accordance with the principle of prudence always emphasized by the Supreme Court of the Republic of Indonesia in handling cases for which an immediate decision is requested (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).*

Keyword : Dispute, Civil Case, Implementation of Immidiate Verdict.

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan dalam perkara perdata merupakan tempat penyelesaian suatu perkara secara litigasi, dimulai pada saat diajukannya gugatan¹ ke Pengadilan Negeri, kemudian terdapatnya upaya hukum biasa dengan mengajukan banding² pada Pengadilan Tinggi, Kasasi³ kepada Mahkamah Agung, dan terdapatnya upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Keseluruhan proses tersebut, pada akhirnya pihak yang menang dalam perkara, akan mengajukan permohonan eksekusi oleh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)⁴, keseluruhan proses tersebut memerlukan waktu yang panjang.

Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga terdapat suatu kepastian hukum dalam Putusan

¹ H.P. Panggabean, 2015, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata Dalam HIR*, PT. Alumni, Bandung, hlm 56-57.

² Elfrida R Gultom, 2017, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta, menyebutkan “*Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan*, hlm 124.

³ *Ibid*, Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, hlm 125.

⁴ H. Riduan Syahrani, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Jakarta., hlm 147.

serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum yaitu perlawanan, banding maupun kasasi, diatur dalam :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya di sebut SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.
2. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Penerapan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Terhadap Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A?
2. Apakah yang menjadi penghambat dikabulkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam mengenai penerapan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dikabulkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Bagi penulis
Hasil penelitian ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Bagi ilmu hukum
Hasil penelitian diharapkan untuk menyumbang pemikiran dan pengembangan teori, konsep ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum acara perdata.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pengadilan Negeri
Hasil penelitian diharapkan untuk menyumbangkan wawasan hukum mengenai Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri.
- 2) Bagi para pihak
Hasil penelitian diharapkan untuk memberikan pengetahuan kepada para pihak mengenai prosedur hukum yang tersedia bagi para pihak.
- 3) Bagi masyarakat
Hasil penelitian diharapkan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat terkait Putusan

Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan, “kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa dapat dilaksanakan”⁵. Kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakatnya. Dengan perkataan lain, menurutnya peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodregel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁶ Kepastian hukum itu harus meliputi seluruh bidang hukum.⁷ Kepastian hukum dalam Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus memperhatikan asas-asas, norma-norma, dan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum.

2. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa dan menetapkan hak atau kedudukan hukumnya, yang selanjutnya mewujudkan realisasi atau pelaksanaan eksekusinya secara paksa. Suatu putusan yang hanya memiliki kekuatan mengikat saja belum cukup dan tidak berarti apa-apa, bila putusan

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm 160.

⁶ *Ibid*, hlm. 118.

⁷ Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi, hlm. 162.

tersebut tidak dapat direalisasikan atau dieksekusi. Jadi putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial adalah putusan yang menetapkan secara tegas terhadap hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan melalui eksekusi yang dilakukan oleh alat negara.⁸

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah hal, cara, atau hasil kerja menerapkan⁹.
2. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, bukan hanya diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan oleh hakim¹⁰.
3. Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) adalah putusan Hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau perlawanan.¹¹
4. Perkara Perdata dapat dibedakan atas perkara yang mengandung sengketa (*contentieus*), pihak-pihak yang bersengketa

⁸ Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 194.

⁹ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka, Sinar Harapan, Cetakan ke-3, Jakarta, hlm .

¹⁰ Sudikno Merokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka Cet Ke-5, Yogyakarta, hlm 220

¹¹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm 114.

mengajukan permohonan tuntutan hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut dengan gugatan. Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.

5. Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum, dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang, berlandaskan pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹² Penelitian hukum sosiologis dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru guna memperoleh data primer.

Sedangkan sifat penelitian ini bersifat *deskriptif* yang Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian *deskriptif* yaitu memberikan data yang seteliti

¹² Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51

mungkin, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau menyusun teori-teori baru.¹³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, karena berkaitan dengan Penerapan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dalam perkara perdata dalam Register Nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.PBR dan perkara perdata register nomor : 116/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 12 Desember 2013 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim dan Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak

terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁵ Pertimbangan yang dipakai untuk memilih responden dalam penelitian ini adalah Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) yang pernah dikabukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer penulis peroleh langsung melalui wawancara tanya jawab secara langsung dengan Pegawai Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

b. Data Sekunder, merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum¹⁶, terdiri dari :

1) Bahan hukum Primer yaitu data yang penulis peroleh langsung dari sampel dan responden yang berkaitan erat dengan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang berasal dari hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data.

¹³ *Ibid*, hlm 10.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.18, Rajawali Pers, Depok, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid*, hlm 119.

¹⁶ *Ibid*

Wawancara dilakukan kepada, Hakim yakni Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H., Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. dan Bapak Iwan Irawan SH, Panitera yakni Bapak Sutanto S.H. M.H., Bapak Yan Dharmadi, SH., MH, kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau dan Bapak DR. Arbakmis Lamid, SH., MH selaku Kuasa Hukum Penggugat.

6. Analisis Data.

Metode Analisis Data dalam penulisan proposal ini digunakan teknik analisis kualitatif, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, ditarik kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu penyimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

1. Pengertian Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan Hakim yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding atau perlawanan.¹⁷ Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan serta merta, tanpa menunggu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Dasar Hukum Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

Dasar hukum dari putusan serta-merta yaitu pasal 180 ayat 1 HIR/pasal 191 ayat 1 RBg. Pasal 180 ayat 1 HIR menyatakan:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik.”

3. Tujuan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Tujuan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah agar putusan Hakim dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu sampai putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

4. Manfaat Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Manfaat Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) ditinjau dari proses peradilan yang cenderung memakan waktu yang lama karena tiap-tiap proses dalam pemeriksaan suatu perkara cenderung memakan waktu lama, dengan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), para pencari keadilan yang sering kesulitan mendapatkan haknya.

¹⁷ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 524.

5. Syarat Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Hakim dapat menjatuhkan suatu putusan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi, selama memenuhi syarat yang tercantum dalam SEMA No.3 Tahun 2000 dan SEMA No.4 Tahun 2001.

6 Kriteria Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)

Kriteria Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus bersifat menghukum. *Condemnatoir* atau putusan kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri tanpa amar putusan kondemnator.¹⁸

B. Prosedur Pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

1. Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) sebelum Proses Peradilan.

Setelah pemanggilan para pihak berperkara, dan persidangan

pertama, maka dilanjutkan dengan agenda mediasi yang merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif dan merupakan salah satu elemen pendukung sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. dan dilanjutkan dengan Agenda Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan.

2. Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) saat Proses Peradilan.

Ketua Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Indonesia agar para hakim dalam menjatuhkan putusan serta-merta harus memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg.

3. Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) setelah Proses Peradilan.

Prosedur pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus memiliki putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, sehingga melekat kekuatan pelaksanaan terhadap putusan tersebut. Eksekusi putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) hamper sama dengan prosedur eksekusi pada umumnya ataupun yang dipersamakan undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 975

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A adalah Pengadilan tingkat pertama bagi yang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata, pidana, tindak pidana korupsi dan perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Negeri Kelas Pekanbaru Kelas I A didirikan pada tahun 1959 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman RI No.J.K. 2/44/21 tertanggal 23 Februari 1959.

B. Visi, Misi dan Tugas Struktur Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

C. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tahun 2020-2024 merupakan perencanaan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A yang memuat visi, misi, tujuan, Sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Pekanbaru,

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Penerapan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA No. 26/Pdt.G/2012/PN. PBR tanggal 19 Juli 2012.

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A pernah mengabulkan Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yaitu pada Perkara perdata register nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 19 Juli 2012.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum mengatakan bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) haruslah memperhatikan syarat-syarat yang ada pada Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

Syarat atas permohonan serta merta erat kaitanya dengan beban pembuktian penggugat dalam perkara perdata register nomor : 26/Pdt.G/2012/PN.PBR tanggal 19 Juli 2012, penggugat telah mengajukan bukti terkait prosedur pelaksanaan pembebasan lahan, bidang tanah dan penitipan uang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

“In other words, the

implementation of the judge's decision or execution is essentially the realization of the obligation of the party concerned (defeated) to fulfill the achievements listed in the decision. However, practice in the field, there is often resistance from the party to be executed against the state apparatus carrying out the execution."¹⁹

"Dalam kata lain, implementasi putusan hakim ataupun keputusan, secara esensial adalah realisasi atas kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang termaksudkan dalam putusan tersebut. Tetapi dalam praktek di lapangan, seringkali ada perlawanan dari pihak yang menjadi termohon eksekusi terhadap aparaturnegara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan."

Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) masih sangat relevant dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,²⁰ sepanjang syarat syarat sebagaimana tercantum dalam SEMA terpenuhi,²¹ asalkan

¹⁹ Ahyar Ari Gayo, 2022, *Problematic In The Civil Decision Execution Process In Indonesia In Order To Realize Court Excellence*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 4, Hal 554.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum, tanggal 19 Januari 2023 Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H., Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023.

²¹ Wawancara dengan Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H. selaku Hakim pada

substansinya bisa terpenuhi sesuai dengan SEMA dan sesuai dengan kepentingan dan mendesak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,²²

2. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A No. 116/Pdt.G/2013/ PN.PBR tanggal 12 Desember 2013.

Perkara ini diajukan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru no. 123/Pdt.G/2008/PN.Pbr tanggal 27 Oktober 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 109/Pdt/2010/PTR tanggal 4 Oktober 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2198 K/Pdt/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dasar pertimbangan di dalam mengajukan gugatan yang dimintakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana perkara Perdata No. 116/Pdt.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena Penggugat yang telah memenangkan perkara tersebut, telah mengajukan permohonan eksekusi, namun Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak bisa melaksanakan permohonan eksekusi, disebabkan amar putusan bersifat deklaratoir, oleh karenanya Penggugat meminta amar putusan yang bersifat menghukum/*comdemnatoir*.²³

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

²² Wawancara dengan Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

²³ Wawancara dengan Bapak DR. Arbakmis Lamid, SH., MH selaku Kuasa

*“execution can be carried out if the judge's decision has permanent legal force.”*²⁴

“Eksekusi bisa dilaksanakan jika putusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap”

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi secara paksa oleh pengadilan. Dari tiga bentuk putusan hakim yaitu putusan *declaratoir*, *konstitutif*, dan *condemnatoir*, hanya bentuk yang terakhir ini saja yang dapat dieksekusi. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum, sehingga perlu dilaksanakan secara sukarela atau paksa melalui eksekusi. Sedangkan putusan *declaratoir* dan *putusan konstitutif* tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya.

Putusan serta merta menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena sesuai dengan wawancara dengan Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, dimana seringkali kuasa hukum memperlakukan putusan serta merta sebagai formalitas dan terjadi banyak ketidaksiharan antar tuntutan, putusan serta merta sangat penting untuk memberikan keadilan yang sepatutnya kepada para pencari keadilan yang seharusnya tidak

terhalang oleh kesalahan kuasa hukumnya. Oleh karena itu Putusan serta merta di perkara tersebut, didasarkan putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun digugat kembali dengan memintakan Putusan serta merta, hal tersebut juga linear dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, karena jika tidak diputus serta merta ada kemungkinan pihak tergugat memberikan perlawanan hukum yang artinya akan ada proses waktu yang lama, sedangkan perkara tersebut telah memiliki perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap. Tidakkah adil jika penggugat harus mengulangi keseluruhan proses hukum karena kesalahan kuasa hukumnya.

Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraadd*) menurut bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan tersebut akan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri terkait alasan-alasan dikabulkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraadd*), hal ini memang sangat bersinggungan dengan prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, namun hal ini sangat perlu disikapi karena adanya prinsip kehati hatian dalam putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraadd*).²⁵

Hukum Penggugat perkara perdata register nomor : 116/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 12 Desember 2013, tanggal tanggal 27 Januari 2023.

²⁴ Naek Pamen Simanjuntak, 2022, *Legal Problems and the Ideal Concept of Civil Executions in Indonesia*, International Journal of Law and Politics Studies, Vol.2, No.2, Hal 42

²⁵ Wawancara dengan Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 19 Januari 2023.

*“Formal legal certainty implies that laws and, in particular, adjudication must be predictable”*²⁶

“Kepastian hukum formil secara implisit menyatakan bahwa, hukum dan secara spesifik, penghakiman, haruslah bisa diprediksi”

Menurut Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, terhadap perkara-perkara perdata yang diajukan hampir keseluruhan memintakan permohonan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), namun atas permohonan tersebut sangat sulit diwujudkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam SEMA.²⁷

B. Penghambat Atas Dikabulkannya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

1. Faktor Materil Ditolaknya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

Menurut Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, terhadap permohonan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), terdapat faktor

penghambat materil sehubungan dengan pembuktian autentik tidak terpenuhi dan tidak lengkap, sehingga tidak sesuai dengan SEMA.²⁸ Hambatannya terletak pada ketidaksesuaian perkara dan fakta persidangan terhadap syarat yang telah ditentukan SEMA, yakni;

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti. Apabila para pihak yang mengajukan permohonan serta merta tidak memiliki bukti yang cukup atau ada pihak yang membantah kebenaran tentang isi bukti tersebut, maka majelis akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Apabila para pihak dalam persidangan telah mengakui adanya hutang, namun jumlahnya tidak terbukti secara pasti dan dibantah oleh pihak yang lainnya, maka majelis hakim akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan

²⁶ Elina Paunio, 2009, *Beyond Predictability – Reflection on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order*, German Law Journal, Vol. 10, Issue 11, Hal. 1469

²⁷ Wawancara dengan Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

²⁸ Wawancara dengan Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.

3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik. Apabila para pihak gagal dalam membuktikan adanya perjanjian sewa menyewa, serta tidak memenuhi prestasinya dalam pembayaran sewa menyewa sesuai batas berakhirnya waktu sewa menyewa, maka majelis hakim akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila perkara gugat cerai belum berkekuatan hukum tetap, maka majelis hakim akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, Pada prinsipnya permohonan putusan provisionil diputus sebelum adanya putusan akhir, jika tidak permohonan provisionil tidak dikabulkan hingga putusan akhir, maka majelis

hakim akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.

6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Persyaratan ini berkaitan dengan perkara perdata nomor 116/PDT.G/2013/Pn.Pbr yang telah memiliki putusan terdahulu mempunyai hubungan dengan pokok gugatan perkara terdahulu. Apabila pihak-pihak yang mengajukan permohonan serta merta tidak memiliki putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan, maka majelis hakim akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Apabila para pihak tidak dapat membuktikan kepemilikan atas benda tersebut maka majelis hakim akan menolak permohonan serta merta tersebut karena fakta persidangan tidak sesuai dan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan SEMA.

Ketika salah satu dari tujuh persyaratan yang ditentukan

SEMA dipenuhi, hakim diinstruksikan untuk tidak langsung memutus perkara tersebut melainkan harus terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri yang akan bersurat kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan serta merta tersebut, dan hanya memutus setelah ada petunjuk serta arahan terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan serta merta tersebut.

2. Faktor Formil Ditolaknya Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

Faktor penghambat dari sisi formil seringkali sulit dipenuhi izin ketua pengadilan tinggi, bahkan para pihak yang mengajukan permohonan Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sering tidak sanggup untuk memberikan jaminan uang, yang nilainya setara dengan objek perkara.²⁹ Oleh karenanya selama bertugas di Pengadilan Negeri Pekanbaru ataupun Pengadilan Negeri sebelumnya, tidak pernah mengabulkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).³⁰

Izin Ketua Pengadilan Tinggi merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, Ketua Pengadilan Negeri akan bersurat pada Ketua Pengadilan Tinggi,

agar putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak disalah gunakan, setiap proses yang dilakukan agar prinsip kehati-hatian sebelum diputuskan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) oleh majelis hakim ada dalam bentuk konsultasi lalu berdasarkan izin Ketua Pengadilan Tinggi, terkait alasan objektifitas dan persyaratan SEMA.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum, hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A, terkait permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) adalah sangat mendukung prinsip kehati hatian dan independensi Hakim dalam mengadili, permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dari para pihak tersebut harus diputus dengan sangat matang.³²

3. Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A.

Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) selama ini tidak pernah terdapat kejadian eksekusi pemulihan yaitu eksekusi guna merestorasi dan memulihkan keadaan sedia kala, disaat putusan pengadilan negeri di batalkan oleh pengadilan tinggi

²⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

³⁰ Wawancara dengan Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

³¹ Wawancara dengan Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 19 Januari 2023.

³² Wawancara dengan Bapak Daniel Ronald, S.H., M.Hum selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 19 Januari 2023.

ataupun kasasi, selama bertugas belum pernah mengeksekusi pemulihan, karenanya Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) selama ini tetap memegang prinsip kehati-hatian³³.

Bentuk saran dari Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. terkait permohonan Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) saat ini sangat dibutuhkan sosialisasi bagi para penasehat hukum dan para pencari keadilan untuk mengetahui Putusan Serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) bukanlah sekedar formalitas dan tidak boleh asal dimohonkan tanpa permintaan, urgensi dan bukti yang jelas.³⁴ tetapkan SEMA.³⁵

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penerapan Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A telah efektif, dikarenakan sebelum memutus, setiap syarat telah dipenuhi sesuai ketentuan SEMA No 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dapat menjadi pedoman bagi Hakim seiring

³³ Wawancara dengan Bapak Sutanto S.H. M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Salomo Ginting S.H. M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

³⁵ Wawancara dengan Bapak Andi Hendrawan, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas I A tanggal 15 Maret 2023

dengan perkembangan dunia peradilan dan menjadi alat bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat dilaksanakan Eksekusi karena tidak ada mencantumkan amar *condemnatoir* (menghukum) dalam amar putusannya akibat kelalaian dari penggugat atau kuasanya.

2. Hambatan atas dikabulkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana persyaratan materil terletak pada ketidaksesuaian perkara dan fakta persidangan, dikarenakan banyak perkara yang memintakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) cenderung tidak memenuhi persyaratan yang di tentukan SEMA. Hambatan formil ketika salah satu persyaratan dari tujuh persyaratan dipenuhi, Hakim diinstruksikan agar tidak langsung memutus perkara, namun terlebih dahulu berkonsultasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri.

B. Saran.

1. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang petitumnya ada tuntutan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), agar tidak menyimpang dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.

2. Para Pihak serta kuasa hukum yang mengajukan permohonan serta merta hendaknya lebih memahami ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, supaya putusan yang dimenangkan tidak hanya kemenangan di atas kertas, tapi betul-betul dapat dijalankan, tersedia jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek sengketa dan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi dapat terpenuhi, sehingga putusan serta merta sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Elina Paunio, 2009, *Beyond Predictability – Reflection on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order*, German Law Journal, Vol. 10, Issue.
- Faisal, 2012, *Menerobos Positivisme Hukum*, Gramata Publishing, Bekasi.
- Gayo, Ahyar Ari, 2022, *Problematic In The Civil Decision Execution Process In Indonesia In Order To Realize Court Excellence*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 22, No. 4.
- Gultom, Elfrida R, 2017, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Perkembangan Hukum SPerdata di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Nasir, Muhammad, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta.
- Panggabean, H.P., 2015, *Skematik Ketentuan Hukum Acara Perdata Dalam HIR*, PT. Alumni, Bandung.
- Simanjuntak, Naek Pamen, 2022, *Legal Problems and the Ideal Concept of Civil Executions in Indonesia*, International Journal of Law and Politics Studies, Vol.2, No.2.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pres, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.18, Rajawali Pers, Depok.
- Syahrani, H. Riduan, 2016, *Sistem Peradilan dan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Jakarta.